

From Cost to Investment : Pemerintah Mendorong Perubahan Paradigma Bisnis Melihat Bencana



Kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia di dalamnya, memiliki kerentanan bencana tertinggi dibandingkan benua lainnya. Angka kejadian bencana di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat pada periode Februari 2020 s.d Februari 2021 terjadi 3.253 bencana di Indonesia yang didominasi oleh bencana hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, puting beliung), serta jenis bencana geologi seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan lainnya.

Bencana-bencana tersebut mengakibatkan korban jiwa maupun materiil (kerusakan infrastruktur dan kerugian ekonomi) yang mempengaruhi berbagai lapisan masyarakat termasuk dalam dunia usaha. Dampak bencana terdalam dan terluas saat ini yang melanda seluruh negara manapun tanpa terkecuali adalah bencana pandemi.

Beberapa hal penting mengenai program-program prioritas Pemerintah Indonesia untuk pemulihan ekonomi nasional pascabencana, baik alam maupun pandemi Covid-19 disampaikan dalam Asia-Pacific Alliance for Disaster (A-PAD) International Symposium 2021, yang mengangkat tema Private Sector Involvement in Strengthening Disaster Resilience Capacity "In Search of a Locomotive for Economic Recovery after Pandemic", di Jakarta (10/06).

Simposium bertujuan untuk membuka peluang kemitraan regional, melalui berbagi pengalaman dari pemulihan dan pembangunan yang lebih baik (Build Back Better) dari berbagai bencana, khususnya dari dampak pandemi Covid-19.

Program-program prioritas yang dilakukan Pemerintah diantaranya pengembangan ekonomi lokal berbasis pariwisata, agribisnis, dan ekonomi sirkular, penciptaan lapangan kerja padat karya dengan percepatan implementasi omnibus law (UU Cipta Kerja No. 11 tahun 2020), pengembangan cadangan pangan nasional melalui pembangunan food estate, pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan percepatan pembangunan 5 destinasi pariwisata super prioritas, serta pemasaran produk dalam negeri melalui tagline "Bangga Buatan Indonesia" dan "Bangga Pakai Produk Lokal".

"Simposium menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi antara lain diperlukannya pelibatan atau partisipasi sektor bisnis atau swasta, integrasi dengan berbagai pihak terkait lainnya dalam upaya mengurangi risiko bencana yang ada dan mempercepat pemulihan ekonomi pascabencana," ujar Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Wahyu Utomo yang diwakili oleh Asisten Deputy Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi Muksin, yang hadir sebagai Keynote Speaker dalam simposium tersebut.

Peran sektor swasta memperkuat ketahanan bencana menjadi penting mengingat sektor swasta, secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi kehidupan dan penghidupan banyak orang. Aktivitas usaha yang dilakukan juga sangat mempengaruhi keberlanjutan lingkungan dan berkontribusi terhadap perubahan iklim antropogenik.

“Konsep Business Continuity Plan atau Business Continuity Management (BCP/BCM) untuk sektor bisnis atau swasta yang tangguh bencana diperlukan. Konsep BCP atau BCM ini adalah berfikir secara holistik dengan memiliki kejelian dan kewaspadaan untuk mencegah munculnya potensi krisis serta kemampuan untuk mengubah krisis menjadi peluang strategis,” ujar Dr. Goh Mong Heng, Business Continuity Management Institute Singapore.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Kedeputian Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang mendorong penerapan BCP/BCM oleh sektor bisnis/swasta dalam rangka mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). BCP/BCM merupakan dokumen rencana yang berisi strategi-strategi dunia usaha secara mandiri dalam memulihkan secara cepat bisnis intinya pascabencana alam dan pandemi Covid-19.

Penerapan BCP oleh dunia usaha termasuk UMKM merupakan suatu langkah strategis dalam beradaptasi dengan kondisi Indonesia yang berada pada kawasan ring of fire. Keberadaan BCP juga akan membuat dunia usaha di Indonesia lebih siap menghadapi bencana baik alam maupun pandemi.

Investasi untuk peningkatan manajemen bencana berupa pemanfaatan/inovasi teknologi terkini, antara lain Artificial Intelligence (AI), 5G, Cloud Computing (CC), Big Data, Internet of Things juga perlu dilakukan.

Berdasarkan pengalaman dari beberapa negara jaringan A-PAD internasional, hal-hal terkait penguatan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antar lembaga baik lokal, nasional, dan internasional dalam penanganan bencana dapat membantu percepatan pemulihan ekonomi pascabencana, baik bencana alam maupun pandemi Covid-19.

Turut hadir dalam acara yaitu Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Mr. Kenji Kanasugi dan perwakilan BNPB, Zaherman Muabezi, SH. Narasumber yang juga memberikan paparan pada simposium ini adalah Mr. Kensuki Onishi (CEO of A-PAD) dan Dr. Goh Mong Heng (BCM Institute Singapore), serta A-PAD network panelists dari 5 negara yaitu Jepang, Korea, Filipina, Sri Lanka, dan Bangladesh. (dep6/frh/fsr/hls)
